

SKRIPSI

POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BARAKKAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



**OLEH:
JAMIL ISMAIL
E041181505**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Usulan Proposal Penelitian

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
BARAKKAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**

Yang Diajukan Oleh:


JAMIL ISMAIL

E041181505

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ariana Yunus, M.Si.
NIP. 19710705199832002


Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si
NIP . 196805082022043001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik


Dr. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP.19621231 199003 1 023



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
BARAKKAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oeh :

JAMIL ISMAIL

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Ariana Yunus, M.Si

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMIL ISMAIL

NIM : E041181505

Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)

Program studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BARAKKAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

September 2022



METERAI TEMPEL
79AAKX062046335
JAMIL ISMAIL

ABSTRAK

Jamil Ismail, E041181505, Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, Di bawah bimbingan Ibu Ariana dan Bapak Muh. Imran.

Fenomena relasi kekuasaan dan kekerabatan sebagai sebuah strategi politik dapat dilihat pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di kecamatan Lamuru kabupaten Bone. Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala Desa Barakkae kecamatan lamuru kabupaten Bone. Semenjak desa barakkae menjadi salah satu desa otonom dikecamatan lamuru desa barakkae telah melewati 5 kali proses pemilihan kepala desa langsung dimana pada awal terbentuknya kepala desa barakkae dipimpin oleh ABD. Rahman, T. dengan masa jabatan 2 periode yaitu tahun 1989-2008. Kemudian di tahun selanjutnya anaknya yang terpilih menjadi kepala desa yakni Hj.Sapinah selama 3 kali berturut-turut hingga pemilihan terakhir di 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif, data primer dalam penelitian ini melalui proses wawancara mendalam dengan mewawancarai kepala desa Barakkae, Hj.Sapinah dan tokoh masyarakat Barakkae beserta masyarakat desa Barakkae. Kemudian penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari studi Pustaka dokumen yang relevan dengan penelitian yang dianggap mampu menjawab rumusan masalah. Dalam menganalisis hasil wawancara pada penelitian ini penulis menggunakan konsepsi politik dinasti dan teori politik kekerabatan serta kekuatan politik untuk melihat andil pemanfaatan politik kekerabatan dalam kemenangan Hj.Sapinah di Pemilihan Kepala Desa Barakkae.

Hasil dari penelitian ini menemukan politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa masih sangat kental. Dipengaruhi oleh patron "*Ajjuareng*" terhadap masyarakat Desa Barakkae yang berpengaruh hingga ke keturunan-keturunannya, dalam hal ini Abd. Rahman, T dan Hj.Sapinah di Desa Barakkae. Alasan politik kekerabatan ini ada pada kepala desa Barakkae karena masyarakat memiliki kepercayaan bahwa anak akan mewariskan apa yang dimiliki oleh orang tuanya atau dalam kepercayaan kerajaan Bone disebut dengan "*Assajireng*".

Kata Kunci: Politik Kekerabatan, Patron-Klien, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Jamil Ismail, E041181505, Politics of Kinship in the Election of the Village Head of Barakkae, Lamuru District, Bone Regency, Under the guidance of Mrs. Ariana and Mr. Muh. Imran.

The phenomenon of power and kinship relations as a political strategy can be seen in the 2021 simultaneous village head elections in Lamuru sub-district, Bone district. As happened in the election of the head of Barakkae Village, Lamuru sub-district, Bone district. Since the village of Barakkae became one of the autonomous villages in the Lamuru sub-district, Barakkae Village has gone through the process of direct village head elections where at the beginning of the formation of the Barakkae Village Head, it was led by ABD. Rahman, T. with two terms of office, 1989-2008. Then in the following year his son who was elected as village head, namely Hj.Sapinah for 3 times in a row until the last election in 2021.

This study uses a qualitative research method with descriptive analysis type, primary data in this study through an in-depth interview process by interviewing the village head of Barakkae, Hj.Sapinah and Barakkae community leaders and the Barakkae village community. Then the author uses secondary data derived from the study of library documents relevant to the research which is considered capable of answering the formulation of the problem. In identifying the results of interviews in this study, the author uses the conception of dynastic politics and the theory of kinship politics and political power to see the contribution of the use of kinship politics in Hj.Sapinah's victory in the Barakkae Village Head Election.

The results of this study found that the politics of kinship in village head elections was still very strong. Influenced by the patron "Ajuareng" to the people of Barakkae Village who influenced his descendants, in this case Abd. Rahman, T and Hj.Sapinah in Barakkae Village. The political reason for this kinship lies with the village head of Barakkae because the community has a belief that children will inherit what is owned by their parents or in the belief of the Bone kingdom called "Assajireng".

Keywords: Kinship Politics, Patron-Client, Village Head Election

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**POLITIK KEKERABATAN PEMILIHAN KEPALA DESA BARAKKAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**”. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis, dalam pendahuluan ini, untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang dikirimkan Tuhan kepada penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak **Drs. Ismail** dan Ibu **Hj.Karmida S.Sos**, yang menyayangi juga selalu

berkorban dan menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan mamaku tercinta dan tersayang, doa kalian yang tiada hentinya selalu terpanjatkan untuk penulis terus berkarya dan melangkah dalam menuntut ilmu sejauh ini. Kepada saudari penulis **Fitri** yang selalu hadir dalam keadaan apapun. Dan kepada seluruh keluarga besar **Hj.Sapina** yang selalu mendoakan dan membantu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.**, selaku dosen pembimbing 1 dan **Dr. Muh. Imran S.IP, M.Si.**, selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya selamat atas masa baktinya, semoga kedepannya memberikan banyak kemajuan dalam sistem pendidikan Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. **Bapak Dr. Hasrullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm)**, Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi seorang mahasiswa.
7. Kepada perangkat Desa Mamminasae, yang telah memberi banyak pengalaman berharga dalam perjalanan saya menuju titik ini.
8. Kepada kepala Desa Barakka **Hj.Sapina** yang turut memberi support dan motivasi yang tak akan saya lupakan hingga sampai saat ini.

9. Kepada kak **Akbar Najemuddin S.IP**, dan kak **Muh. Fichriyadi, S.IP** terima kasih telah memberikan banyak arahan dan dorongan untuk bisa mengiringi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman **Revolusi'18** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa dengan segala pengalaman kepengurusan.
11. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 18** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
12. Kepada Teman- teman Cerita Pondok Terima Kasih juga turut mewarnai kehidupan penulis dengan segala pengalam terbaiknya.
13. Kepada saudara saya **Agus Salim** yang membuat penulis berproses meraih banyak pengalaman.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah dikehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Agustus 2022

JAMIL ISMAIL

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.3.2. Manfaat Penelitian	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Konseptualisasi Politik Dinasti.....	20
2.1.1. Pengertian Politik Dinasti	20
2.1.2. Tipologi Budaya Politik Familisme	25
2.1.3. Teori Politik Kekerabatan	27
2.1.4 Kekuatan Politik.....	29
2.2. Konsep Patron-Klien.....	31
2.3. Konseptualisasi Pemilihan Kepala Desa	35
2.4. Kerangka Pemikiran.....	37
2.5. Skema Pemikiran	38

BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian.....	39
3.2.2 Tipe Penelitian	39
3.3 Informan Penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1.Data Primer.....	41
3.4.2.Data Sekunder.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1.Wawancara Mendalam.	41
3.5.2.Arsip/Dokumen	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	45
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Sejarah Desa Barakkae	45
4.2 Kondisi Geografis Desa Barakkae.....	47
4.3 Kondisi Demografis Desa Barakkae	49
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa Barakkae	52
4.5 Profil Hj. Sapinah	53
BAB V	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
5.1 Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa Barakkae	55

5.1.1 Hubungan Patron-Klien “Ajuareng” Dengan Masyarakat Desa Barakae.....	57
5.1.2 “Assajingeng” dalam Praktik Politik di Desa Barakae	63
5.2 Kekuatan Kekerabatan “Ajuareng” dalam Kemenangan H. Sapinah di Pilkades Barakae.....	67
BAB VI.....	77
PENUTUP.....	77
6.1. Kesimpulan.....	77
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu pemilihan umum menjadi salah satu agenda yang rutin bagi sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia pemilihan umum atau pemilu biasanya dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Adapun pemilu yang dilaksanakan di saat mulai dari memilih presiden, DPR, DPD, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota DPRD Kab./Kota Serta Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi lokal dalam wilayah pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi perkembangan dan pertumbuhan desa. Pada pemilihan kepala desa masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban warga Negara agar pada pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. lebih lanjut pemilihan kepala desa secara langsung diharapkan dapat melahirkan kepala desa terpilih sesuai dengan kehendak rakyat didesa.

Gambaran akan politik kekerabatan pada pemilihan kepala desa pasca pemberlakuan undang – undang desa no 16 tahun 2014 semakin

menguatkan unsur – unsur politik kekerabatan. Dimana banyaknya kandidat kepala desa yang telah menjabat 3 periode sebagai kepala desa kemudian mendorong sanak kerabatnya ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Politik kekerabatan justru makin menunjukkan adanya akar feodalisme dan tradisi monarkhi belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi pemilihan umum, melainkan nepotisme, dan kolusi. Ketika politik dinasti coba dijauhkan dari sistim demokrasi, maksudnya untuk mencegah penguasaan politik pada satu kelompok. Penguasaan politik yang terpusat pada satu kelompok membuka peluang terjadinya praktik dinasti.

Lebih lanjut menurut Redfied¹ mengatakan bahwa Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klen keluarga. Misalnya dalamsuatu desa terdapat beberapa kelompok keluarga yang tinggal secara berdekatan dalam satu desa. Kelompok keluarga tersebut hidup bersama, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi. interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentimen komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Proses interaksi yang berlangsung terus menerus, membuat setiap individu mengenal keseluruhan anggota komunitasnya secara mendetail.

Kekerabatan pada masyarakat desa memiliki kaitan yang erat

¹ Devi Siswandani, Peran Jaringan Kekerabatan Dalam Praktik Politik Lokal Di DesaBanyulegi (Kajian Antropologi Politik). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020. Hlm. 3

dengan konsep kekuasaan. Menurut Budiardjo² bahwa kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar bertindak seperti yang dikehendaki oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut. Sistem kekuasaan di desa dijalankan oleh aparat pemerintahan desa guna mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat.

Kekuasaan tertinggi di desa berada di tangan seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi dengan dibantu oleh bendahara, sekretaris, dan jajaran perangkat desa lainnya guna melayani masyarakat serta mengelola pembangunan desa. Kekuasaan di desa tidak lepas dari suatu konsep kekerabatan. Konsep kekuasaan dan kekerabatan memiliki keterkaitan yang sangat erat, khususnya dalam politik lokal. Dimana masyarakat desa pada umumnya masih menjalankan nilai, norma dan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kekerabatan merupakan salah satu nilai yang masih dijaga hal tersebut dikarenakan tingginya rasa solidaritas dalam kehidupan masyarakat desa.

Faktor kekerabatan merupakan sebuah unsur penting dalam sebuah kekuasaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Suwargono dan Nugroho³ bahwa Antropologi Politik memperlihatkan adanya ikatan-ikatan kompleks

² Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta : 1995. Hlm 33.

³ Devi Siswandani, Peran Jaringan Kekerabatan Dalam Praktik Politik Lokal Di Desa Banyulegi (Kajian Antropologi Politik). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020. Hlm. 4

antara kekuasaan dan kekerabatan. Balandier dalam bukunya juga menjelaskan adanya ikatan antara kekuasaan dan kekerabatan. Keterkaitan antara kekerabatan dan kekuasaan dicontohkan dengan politik orang Tonga di Malawi dimana kekerabatan merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara kekuasaan dan kekerabatan yang saling mempengaruhi. Pada titik inilah kemudian politik dinasti menjadi sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam sistem demokrasi lokal seperti halnya pemilihan kepala desa. Fenomena relasi kekuasaan dan kekerabatan sebagai sebuah strategi politik dapat dilihat pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di kecamatan lamuru kabupaten bone. seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa barakkae kecamatan lamuru kabupaten bone.

Secara histori desa barakkae resmi menjadi desa otonom pada tahun 1989 yang dimekarkan dari desa poleonro kecamatan lamuru. Semenjak desa barakkae menjadi salah satu desa otonom dikecamatan lamuru desa barakkae telah melewati 5 kali proses pemilihan kepala desa langsung dimana pada awal terbentuknya kepala desa barakkae dipimpin oleh ABD. Rahman, T. dengan masa jabatan 2 periode yaitu tahun 1989-2008.

Setelah periode ABD. Rahman, T. berakhir kemudian mencalonkan ibu Hj. sapina sebagai kepala desa untuk melanjutkan kekuasaanya dimana Hj. sapina merupakan anak dari ABD. Rahman, T. pemilihan kepala desa

tahun 2008 dimenangkan oleh Hj. sapina. Lebih lanjut pemilihan kepala desa barakkae pada tahun 2015 kembali dimenangkan oleh Hj. sapina setelah mengalahkan beberapa lawan politiknya. Bahkan pada pemilihan kepala desa tahun 2021 Hj. sapina Kembali memenangkan pemilihan kepala desa setelah mengalahkan anaknya sendiri sebagai kandidat calon pendamping.

Kemenangan Hj. sapina dalam beberapa kali kontestasi politik desa barakkae dikarenakan bekerjanya jaringan politik kekerabatan. Dimana Hj. sapina sebagai kepala desa barakkae selama ini telah membangun jejaring politik kekerabatan didalam pemerintahan desa barakkae. Dari beberapa pejabat structural desa barakkae beberapa diantaranya merupakan sanak family dari Hj. ibu sapina. Sehingga para kerabat dan keluarga yang selama ini menjadi bagian dari kekuasaan ibu sapina selalu tampil menjadi bagian dari proses tim pemenangan Hj. sapina.

Fenomena dinasti politik di desa barakkae selama ini jika kita perhatikan dari proses pemilihan kepala desa yang selalu menempatkan kemenangan pada satu keturunan keluarga tertentu menunjukkan bahwa system kekuasaan dilakukan secara mewariskan kekuasaan. Politik dinasti menunjukkan bahwa kekerabatan keluarga merupakan alat kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu kekuasaan yang bersumber dari hubungan keluarga ataupun kerabat tidak akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat terutama dalam pelayanan dan keadilan ditengah masyarakat.

Politik dinasti merupakan serangkaian strategis oknum-oknum tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaannya melalui saudara ataupun

kerabat, tentu akan merugikan orang lain karena yang seharusnya pemimpin itu berdiri dan tampil sebagai kepala dan bapak bagi semua golongan tanpa kecuali. Kekuasaan yang dijalankan oleh Hj.Sapina sebagai kepala desa selama ini merupakan realitas kekuatan politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala desa barakkae.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian penulis melihat nampaknya terjadi proses politik kekeluargaan atau kekerabatan yang saling terkait pada saat pemilihan kepala desa barakkae, yang menjadi kekuatan utama Hj. sapina dalam memenangkan pemilihan kepala desa barakkae Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Politik Kekerabatan Dengan Studi Pemenangan Hj. Sapina Dalam Pemilihan Kepala Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan terkait judul tersebut maka penulis membatasi dengan rumusan masalah. Bagaimana kekuatan politik kekerabatan dalam pemenangan pemilihan kepala desa barakkae kecamatan lamuru kabupaten bone.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses terbentuknya politik kekerabatan di desa Barakkae kecamatan Lamuru kabupaten bone.
2. Untuk Mengetahui bertahnya politik kekerabatan di desa Barakkae

kecamatan Lamuru kabupaten Bone.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat akademis

1. Dapat menjadi bahan acuan pembelajaran terhadap dinamika politik pada pemilihan kepala desa khususnya yang berkaitan dengan politik kekerabatan
2. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan Ilmu Pengetahuan.

B. Manfaat praktis

1. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas ilmu politik, khususnya politik dinasti dalam pemilihan kepala desa
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang konsep, teori dan pendekatan yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penulis menganalisis masalah ini dengan menggunakan, konseptualisasi dan teori politik dinasti. Hal dianggap saling terkait dengan fenomena tema masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, sekaligus menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2.1. Konseptualisasi Politik Dinasti

2.1.1. Pengertian Politik Dinasti

Budaya politik Indonesia memiliki karakteristik yang menarik. Budaya politik kekerabatan adalah salah satu wujud keunikan tersebut. Budaya politik kekerabatan menempatkan posisi perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai strategi pengekalan kekuasaan. Politik dinasti menampilkan kekuatan *status quo* melalui familinya (keluarganya).

Pemilu sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan demokratisasi, seyogyanya hanya dapat berjalan apabila budaya politik kekerabatan tidak menjadi perilaku utama aktor politik dalam proses sirkulasi elit. Perilaku politik dengan mengedepankan asas politik kekerabatan tentunya akan berwujud politik dinasti.

Dinasti politik, secara umum dimaknai sebagai model kekuasaan yang didominasi oleh satu keluarga dan atau kerabat, yang dibangun melalui mekanisme dan strategi tertentu yang memungkinkan terjadinya proses pewarisan kekuasaan berlangsung secara turun temurun atau berputar-putar dilingkungan keluarga atau kerabat.

Pablo Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai, "*a particular form of elite persistence in which a single or few family groups monopolize political power*" (sebetuk penguasaan elit yang lama ketika sebuah atau beberapa keluarga memonopoli kekuasaan politik.⁴ Dari penjelasan Pablo Querubin kita bisa melihat bahwa Dinasti politik adalah sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Lebih lanjut Mark Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari transisi kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga. Adapun Defenisi politik dinasti yang dirumuskan oleh Yasushi Asako dkk, melihat bahwa dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka.⁵

Pengertian dari politik dinasti yang diuraikan oleh beberapa ahli diatas, menunjukkan bahwa politik dinasti memiliki hubungan sangat erat dengan kepentingan keluarga atau politik kekerabatan. Kepentingan

⁴ H. Agus sutisna, "*Memilih Gubernur, Bukan Bandit Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 Di Tanah Jawa*" CV Budi Utama (Yogyakarta : 2017) hal. 41.

⁵ Ibid. hal 43

keluarga menjadi faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan politik dinasti dalam suatu sistem demokrasi. Dalam tradisi politik dinasti seperti ini anggota keluarga yang sudah menjadi penguasa atau menduduki jabatan publik akan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan berbagai keistimewaan kepada anggota keluarga atau kerabatnya, yang kemungkinan besar akan mengesampingkan kesejahteraan bersama.

Eisenstadt dan Roniger dalam studinya mengemukakan empat hal pemberian prioritas kepada anggota keluarganya dalam kehidupan politik : *pertama*, kepercayaan (*trusty*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercayakan tak mungkin berkhianat seperti lazim yang dilakukan pemburu kekuasaan, *kedua*, kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain, *ketiga*, solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat, *keempat*, proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar.⁶

Mereka yang dari kerabat yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki oleh keluarga ketimbang yang lain. Politik

⁶ Ibid. hal. 44

dinasti dalam Negara demokrasi menimbulkan ancaman problematis dalam kehidupan politik. Karna akan mempersempit ruang partisipasi publik serta mengesampingkan kesetaraan politik. Sehingga jabatan– jabatan publik hanya akan dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki hubungan kekerabatan. Politik dinasti menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Hal ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh

Kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budayapolitik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya.⁷ Pengertian lainnya, *familisme* juga dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon 2002).

Pengertian tersebut merujuk pada kasus Eropa pertengahan bahwa individualisme seseorang dalam ekspresi berpolitik tidak akan menjadi kuat jika tidak melibatkan sanak famili di dalamnya. Namun demikian, ekspresi berpolitik bukanlah untuk mengamankan kekuasaan, tetapi lebih mengarah pada artikulasi ide-ide dalam membangun masyarakat. Maka, melalui jejaring familisme, ide-ide tersebut akan terjaga dan tersampaikan oleh

⁷ Djati, wasisto Raharjo, *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi ; Dinasti politik di Aras Lokal* (Jurnal sosiologi masyarakat, Vol.18, No.2, juli 2013), hlm. 208

anggota keluarga lainnya yang berkecimpung dalam politik. Adapun orientasi terhadap menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut sangat erat kaitannya dengan sifat naluri manusia untuk senantiasa menjagazona kenyamanan beserta fasilitas kenyamanan beserta fasilitas keamanan di dalamnya. Hal itulah yang kemudiaan mendorong penguasa menjaga kekuasaan tetap berpusat dan tidak berpindah ke pihak lain melalui beragam cara.⁸

Konsep familisme di Eropa/Amerika Utara tidak sama seperti yang terjadi dalam kasus negara-negara dunia ketiga. Familisme dimaknai sebagai usaha untuk menyuburkan sikap favoritisme, nepotisme, seksionalisme, maupun regionalisme. Hal tersebut dilandasi adanya semangat bersama untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan secara kolektif. Namundemikian, derajat ketergantungan dalam familisme sendiri juga saling berdiferensiasi bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Artinya, hubungan darah (*consanguinity*) tidaklah menjadi patokan mendasar bagi seseorang untuk mendorong sanak keluarga dalam ranah politik. Terdapat berbagai pertimbangan lainnya seperti tuntutan masyarakat, lingkungan, maupun kondisi tertentu yang kemudian mendorong adanya politik dinasti. Patrimonialisme maupun nepotisme yang kerap menjadi konsep teoritik dalam membahas dinasti politik sebenarnya merupakan salah satu varian dari budaya politikfamilisme.⁹

⁸ Ibid, hlm. 208

⁹ Ibid. hlm. 209-210

2.1.2. Tipologi Budaya Politik Familisme

Djati Wasisto Raharjo mengatakan ada tiga varian familisme.¹⁰ Pertama adalah familisme (familism), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut (Garzon 2002:4).

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Park 2009:124).

Ketiga adalah egoisme-familisme. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoism ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni

¹⁰ Ibid, hlm, 208

kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Park 2009:126).

Tabel 2.1 Tipologi Perspektif Budaya Politik Familisme

No	Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
1	Dasar pembentukan politik dinasti	Hubungan darah langsung	Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan dan solidaritas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
2	Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan kroni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan	Keluarga inti
3	Sifat Dinasti politik	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

Sumber : Jurnal Sosiologi Masyarakat 2013

Politik dinasti sebagai bentuk politik keluarga (political clan) digunakan Kreuzer (2005) dan Cesar (2013). Dinasti politik muncul sebagai akibat dari warisan feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksudkan bukan hanya penguasaan sumber daya

ekonomi saja, tetapi juga terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan para tokoh informal. Tokoh informal tersebut pada umumnya memiliki massa besar yang digunakan untuk menopang kekuasaan keluarga.

Dari beberapa pengertian tentang politik dinasti yang dijelaskan oleh para ahli, kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dinasti merupakan strategi politik yang dilakukan oleh elit politik yang telah memiliki jabatan politik untuk menjaga kekuasaan tetap berada dipihaknya dengan cara melibatkan keluarganya dalam perebutan kekuasaan politik. Politik dinasti pada dasarnya adalah ego elit penguasa berupayameletakkan keluarga dan atau kerabat, pada jabatan – jabatan strategis.¹¹

2.1.3. Teori Politik Kekerabatan

Kekerabatan adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Kekerabatan mencakup anggota keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan dan perluasan keluarga seperti suku dan marga. Kekerabatan menurut David Scheneider sistem berdasarkan hubungan persaudaraan atau adanya hubungan sedarah dari keluarga, hal ini dibangun oleh orang-orang Eropa dan Amerika Serikat.

Sudah menjadi kebiasaan mereka, seperti satu keluarga ayah, ibu

¹¹ Ibid, hlm. 205-206

dan anak-anak tidak menjadi ha lasing sehingga mereka menggunakan cara kekerabatan. Konsep seperti juga terjadi pada kekuasaan tingkat provinsi bahkan paling bawah ditingkat desa. Dengan semakin menguatnya praktek kekuasaan keluarga akan menciptakan pemerintahan yang tidak stabil dan merugikan banyak pihak.

Jika politik kekerabatan dibiarkan berkembang dan menguatkan kekuasaannya akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Negara dijalankan oleh sekelompok orang tertentu yang mempunyai hubungan keluarga/teman maka akan sulit mewujudkan suatu keadilan dan pemerintahan yang bersih serta akan mencederai sistem demokrasi.

Konsep kekerabatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cara perekrutmen orang-orang yang mempunyai pengaruh yang ada di desa untuk dijadikan ala melanggengkan kekuasaan keluarga. Politik kekerabatan banyak menyalahi prosedur yang telah diatur, mereka lebih mempertimbangkan orang yang mempunyai kedekatan baik dari marga dan keturunan.

Politik kekerabatan atau politik keluarga akan semakin kuat di desa barakkae kecamatan lamuru kabupaten bone. terlihat dari kepala desa yang menjabat sekarang dari semenjak des aini terbentuk jabatan kepala desa selama ini dijabat oleh satu keluarga itu sendiri. Hubungan kekerabatan dengan *incumbent* dengan tokoh- tokoh masyarakat tentu akan membuat nepotisme dan favoritisme serta akan semakin kelihatan politik

kekerabatan yang lebih memfokuskan pada satu keluarga tertentu saja.

Adapun alasan peneliti menggunakan teori kekerabatan untuk menganalisis bagaimana kekuatan kekerabatan keluarga abd. Rahman dan Hj.Sapina dalam mempertahankan kekuasaannya sampai sekarang sehingga sukses dalam kontestansi politik ditingkat sampai empat kali priode berturut-turut jatuh ditangan satu keluarga.

2.1.4 Kekuatan Politik

Menurut Miriam Budiardjo yang di maksud dengan kekuatan-kekuatan politik adalah :

“masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.”

Menurut Bachtiar Effendy mengatakan terdapat banyak aspek potensial yang dapat di trasnformasikan menjadi kekuatan politik, diantaranya yaitu :

“kekuatan tersebut bersifat formal atau nonformal. Kekuatan-kekuatan ataupun kelompok-kelompok yang sejenis dengan itu, kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik. Sementara yang di artikan dengan kekuatan-kekuatan politik

yang bersifat nonformal yaitu bagian dari bangunan civil society”¹²

Dalam kekuatan politik di era reformasi terdiri dari beberapa sumber, diantaranya :

1. Sarana paksaan fisik seperti senjata dan teknologi
2. Kekayaan seperti uang dan tanah
3. Normatif seperti pemimpin agama dan kepala suku
4. Popularitas pribadi
5. Jabatan keahlian
6. Massa yang terorganisi
7. informasi¹³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa salah satu kekuatan utama dalam proses sirkulasi elit adalah jabatan seseorang. Dalam kajian politik dinasti, keluarga bukan satu satunya yang merupakan kekuatan politik yang tepat dalam membentuk kekuasaan, sebab kekuasaan politik untuk membentuk kekuatan politik dinasti dimulai dari kekuasaan seseorang yang kemudian di transformasikan kepada sanak keluarga terdekatnya. Keluarga-keluarga yang berkuasa ini akhirnya akan berevolusi menjadi dinasti- dinasti politik yang akan sulit untuk dikalahkan dalam setiap kontestasi perebutan jabatan politik.

Konseptualisasi teori kekuatan politik pada tulisan ini digunakan

¹² P. Anthonius Sitepu, Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3

¹³ Hendra Gunawan, Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia. Materi Pembelajaran 2017

sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana kekuasaan formal dan informal digunakan oleh Hj.Sapina sebagai alat kekuatan politik dalam mempertahankan kekuasaan politiknya didesa barakkae kecamatan lamuru kabupaten bone

2.2. Konsep Patron-Klien

Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, dari pater berubah menjadi patris dan patronis yang berarti bangsawan atau patricius yang berarti seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya.¹⁴ Sebaliknya klien atau client berasal dari kata cliens yang berarti pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas budak yang dimerdekan. Mereka menggantungkan diri pada patron, bahkan kadang menggunakan nama paham sang patron.

Patron berasal dari bahasa latin yaitu "patronas" atau yang kita kenal dengan arti bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata "cliens" yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah "patron" secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar. Sedangkan "klien" berarti bawahan atau orang yang diperintah.

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pemahaman patron klien, berikut ini definisi yang dikemukakan oleh Lande dan Scott. Menurut Lande,

¹⁴ Ng.Philipus, M.S Dr. Nurul Aini. Sosiologi dan Politik cetakan ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011. Hal 41

hubungan patron klien merupakan aliansi dua pribadi yang tidak sama, kekuasaan status atau sumber daya yang masing-masing menemukan suatu hal yang berguna sebagai anggota unggul seperti aliansi yang disebut pelindung dan kliennya disebut inferior.

Menurut Scott, bahwa hubungan patron klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.¹⁵

Cristian Pelras mengatakan hubungan patron klien merupakan hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya (klien). Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya.¹⁶ James Scott mengatakan bahwa patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak di mana pihak memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan resourcesnya untuk melindungi dan memberi manfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. Dalam hubungan

¹⁵ Hedy Shri Ahimsa. 2007. Patron & Klien di Sulawesi selatan. (Yogyakarta : Kepel Pres) edisi terbaru, hal 4

¹⁶ Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini.2011. Sosiologi dan Politik cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 42

ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron.¹⁷

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (Exchange relationship) yaitu bahwa:

- c. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- d. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- e. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
- f. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan.¹⁸

Ciri-ciri hubungan patron-klien:

1. Adanya ketidakeimbangan status antara patron dan klien.
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. Hal. 43

3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang- barang yang dibutuhkan klien dari patro yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut Peter M. Blau sifat hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

- a) Asas resiprositas
- b) In equal
- c) Ada force dan coercion
- d) Ikatan akrab atas dasar saling percaya.

Sedangkan menurut James Scott ada tiga sifat hubungan patronklien:

- e) Basic i equity
- f) Face to face character
- g) Diffuse flexibility (meliputi semua segi kehidupan)

Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:

1. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di ladang, sawah atau usaha lainnya.
2. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat patron atau pelayan rumah tangga.
3. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia

menjadi kaki tangan patron.¹⁹

2.3. Konseptualisasi Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang selenggarakan secara demokrasi.

Pemilihan kepala desa tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan dinamika politik serta budaya politik yang terjadi dalam suatu desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Peraturan terkait pemilihan kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara transparan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dengan

¹⁹ Ibid. Hal 44

membentuk panitia pelaksana. BPD harus memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Adapun syarat – syarat calon kepala desa yang tertuang dalam undang– undang no 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang

9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

10. berbadan sehat

11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

2.4. Kerangka Pemikiran

Politik dinasti adalah strategi politik untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Jaringan sosial dalam bentuk kekerabatan menjadi seperangkat hubungankhusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang yang memiliki ikatan keluarga.

Kelompok kekerabatan yang telah memiliki kekuasaan politik akan membentuk jejaring kekerabatan guna memenangkan keluarganya pada saat terjadinya proses sirkulasi kepemimpinan. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud sirkulasi elit yang selama ini banyak terjadi Praktik politik dinasti. Salah satu bukti konkrit adalah desa barakkae yang sampai saat ini proses pergantian kepemimpinan masih dikuasai oleh satu keluarga.

Berdasarkan catatan sejarah, Abd. Rahman. T. merupakan kepala desa pertama di barakkae kecamatan lamuru dan menjabat selama dua periode. Kemudian kepala desa barakkae setelah Abd. Rahman. T. adalah Hj. sapina yang nota bene merupakan anak kandungnya. Hj. sapina sampai

saat ini masih menjabat kepala desa barakkae setelah berhasil memenangkan pemilihan kepala desa barakkae pada tahun 2021. Dimana pada pemilihan tersebut Hj. sapinamelawan anaknya sendiri.

Kemenangan yang diperoleh oleh Hj. sapina selama 3 kali pemilihan di desa barakkae nampaknya ada kaitanya dengan bekerjanya jejaring politik kekerabatan yang selama ini menjadi kekuatan tersendiri dari Hj. sapina. Maka tulisan ini akan menguraikan Bagaimana politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala desa barakkae kecamatan lamuru kabupaten bone.

2.5. Skema Pemikiran

